

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jalan Veteran No. 03 Ciseureuh - Purwakarta 41118 Telp./ Fax : (0264) - 200459 E-mail : disnakertranspurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS Nomor: 800/89/.6 / SK-IKU/2019

Sinor . 6667 (15)1.6 7 511

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023

KEPALA DINAS

Menimbang:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Purwakarta
 Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas
 Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun
 2018-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk
 mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun
 perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
- Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 164 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023,

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Purwakarta Pada tanggal: 20 April 2019

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

TITOV FIRMAN H NIP. 1961 224 198901 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 800/ &91.B /SK-IKU/2019

Tanggal : 20 April 2019

Tentang : Indikator Kinerja Utama Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Setiap Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif		Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif	60,65%	75%	85,55%	95%	100%	
	Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	65%	75%	85%	95%	100%	
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan	Penyerapan Tenaga Kerja	60%	70%	80%	90%	100%	
Meningkatnya kelancaran berusaha/Investasi serta Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan		Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan	60%	70%	80%	90%	100%	

	Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan	Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja	50%	65%	80%	95%	100%
Menunjang Penyebaran Penduduk melalui pengiriman Transmigran		Penyebaran Penduduk melalui pengiriman transmigran	70%	80%	90%	95%	100%
	Terselenggaranya Pengiriman Transmigran	Pengiriman Transmigran	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Aksesibiltas Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Purwakarta

TITOV FIRMAN H NIP. 1961 224 198901 1 002